



ASOSIASI TEKNOLOGI RITEL INDONESIA

Satu Arah untuk Indonesia Hebat

PUBLIKASI ANGGOTA

Infrastruktur Inklusi Keuangan & Masa Depan Teknologi Ritel Indonesia

Apa yang sedang terjadi, mengapa penting, dan peran ATRI bagi anggota

ATRI-PUB-001/2026 · Edisi September 2026

Klasifikasi: Publikasi Anggota — Untuk Distribusi kepada Anggota ATRI

Daftar Isi

Pengantar Sekretariat.....	3
1. Apa yang Sedang Terjadi.....	3
2. Mengapa Ini Penting bagi Anggota & UMKM.....	3
3. Posisi ATRI: Interoperabilitas Alih-alih Pengungkungan.....	4
4. Lima Prinsip Kebijakan ATRI.....	4
5. Yang ATRI Lakukan — dan yang TIDAK ATRI Lakukan.....	4
6. Kelompok Kerja & Cara Anggota Berpartisipasi.....	5
7. Apa Artinya bagi Anggota.....	5
8. Peta Jalan 12 Bulan (Ringkas).....	5
9. Ajakan Keterlibatan & Kontak.....	5

Pengantar Sekretariat

Rekan-rekan Anggota ATRI yang terhormat,

Ekosistem keuangan dan pembayaran Indonesia sedang bergerak cepat. Identitas kependudukan, rekening, pembayaran, dan aktivitas usaha kini makin tersambung. Sebagai penyedia teknologi ritel yang melayani jutaan merchant dan UMKM, kita berada tepat di titik temu perubahan ini.

Publikasi ini merangkum — secara ringkas dan terbuka — apa yang sedang terjadi, mengapa penting bagi usaha Anda dan merchant Anda, serta bagaimana ATRI berencana berperan sebagai wadah tata kelola yang netral. ATRI tidak bersaing dengan anggotanya dan tidak memihak; kami bekerja pada lapisan standar, interoperabilitas, keamanan, dan kebijakan demi kepentingan bersama.

Kami mengundang partisipasi Anda. Bersama, kita jaga agar kemajuan infrastruktur keuangan nasional benar-benar bermanfaat, aman, dan terbuka bagi seluruh pelaku teknologi ritel.

Hormat kami,

Sekretariat ATRI

Kantor Sekretaris Jenderal

1. Apa yang Sedang Terjadi

Pemerintah menyambungkan lapisan-lapisan infrastruktur publik digital secara berurutan: identitas kependudukan (NIK/IKD) → rekening keuangan → pembayaran → penerimaan QRIS → aktivitas usaha ritel. Beberapa perkembangan terbaru:

- Rekening otomatis berbasis NIK: arahan Presiden (disampaikan Menko Perekonomian, 8 September 2026) agar warga usia 17 tahun otomatis memperoleh rekening melalui bank Himbara. Bentuk aturan dan waktu berlakunya belum ditetapkan.
- MDR QRIS 0% berjenjang (Bank Indonesia), berlaku 1 Oktober 2026: usaha mikro 0% untuk transaksi hingga Rp500.000; usaha kecil/menengah/besar 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 — mengubah ekonomi biaya transaksi bernilai kecil.
- NIK/IKD ditetapkan sebagai fondasi Infrastruktur Publik Digital (Perpres 82/2023), dengan GovTech nasional (INA Digital/INApas) sebagai lapisan identitas dan pertukaran data.

Skala QRIS (data Bank Indonesia): Semester I 2026 mencatat 12,55 miliar transaksi senilai Rp1,12 kuadriliun (+93,92% yoy); per Juni 2026 terdapat 44,86 juta merchant — 96,68% di antaranya UMKM. Inklusi keuangan nasional 93,61% (SNLIK 2026).

2. Mengapa Ini Penting bagi Anggota & UMKM

Titik temu seluruh rel infrastruktur ini berada pada lapisan teknologi ritel — sistem POS dan Merchant Operating System yang kita bangun. Di sinilah kebijakan bertemu ekonomi riil dan UMKM. Dua hal penting untuk diperhatikan:

- Relasi merchant berpotensi makin banyak berasal dari aplikasi bank atau super-app. Interoperabilitas dan kebebasan memilih menjadi kunci agar merchant tetap punya pilihan.
- Ekonomi biaya pembayaran tiket kecil berubah. Nilai penyedia teknologi ritel bergeser ke kualitas layanan operasional, keamanan, dan manfaat bagi merchant — bukan sekadar kanal pembayaran.

Peluang bagi anggota: standar identitas & KYB merchant yang interoperabel, portabilitas data usaha, tata kelola data yang menghormati privasi, pencegahan fraud, serta program literasi UMKM.

3. Posisi ATRI: Interoperabilitas Alih-alih Pengungkungan

Prinsip penambat ATRI sederhana: merchant idealnya bebas memilih POS, bank, penyedia pembayaran, dan kanal mana pun yang patuh — tanpa penguncian. ATRI menyediakan standar dan kerangka jaminan; ATRI bukan platform komersial dan tidak berada dalam jalur transaksi.



Sikap ATRI: mendukung tujuan publik inklusi keuangan, sekaligus mengadvokasi implementasi yang aman, interoperabel, proporsional, netral secara kompetisi, dan menghormati privasi pada lapisan merchant.

4. Lima Prinsip Kebijakan ATRI

- **Inklusi keuangan yang aman, proporsional, dan menghormati privasi.**
- **Interoperabilitas dan portabilitas merchant; non-eksklusivitas; netralitas vendor.**
- **Minimisasi data, pembatasan tujuan, dan tata kelola data terfederasi (privasi sejak desain).**
- **Keamanan & anti-fraud sejak desain (autentikasi kuat, otorisasi API, deteksi fraud, manajemen insiden).**
- **Netralitas kompetisi, partisipasi terbuka, dan kepatuhan yang proporsional.**

5. Yang ATRI Lakukan — dan yang TIDAK ATRI Lakukan

ATRI melakukan	ATRI TIDAK melakukan
Menyusun standar & prinsip interoperabilitas	Menentukan harga atau diskon anggota
Memfasilitasi forum, riset, & dialog kebijakan	Mengalokasikan pasar, merchant, atau wilayah
Menyediakan indikator agregat & teranonimisasi	Mengumpulkan data pribadi/perbankan mentah
Merepresentasikan industri secara netral	Menjadi bank, PSP, vendor, atau regulator

ATRI melakukan	ATRI TIDAK melakukan
Mendorong literasi & keamanan UMKM	Mewajibkan teknologi tertentu / menciptakan eksklusivitas

Netralitas adalah komitmen inti ATRI. Forum ATRI bukan tempat pertukaran informasi komersial sensitif; setiap kegiatan mengikuti protokol hukum persaingan.

6. Kelompok Kerja & Cara Anggota Berpartisipasi

ATRI mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja Infrastruktur Keuangan Ritel & Interoperabilitas, dengan delapan alur kerja: Kebijakan & Regulasi; Interoperabilitas & Standar Teknis; Identitas & KYB Merchant; Tata Kelola Data & Privasi; Fraud & Keamanan Siber; Inklusi Keuangan; Persaingan & Netralitas; Wawasan Ekonomi & Riset.

Cara berpartisipasi

- Menunjuk perwakilan perusahaan Anda untuk salah satu alur kerja.
- Berkontribusi pada penyusunan Prinsip Interoperabilitas (Draf Diskusi) dan baseline keamanan.
- Berbagi tantangan lapangan (dalam bentuk agregat) untuk memperkuat masukan kebijakan.
- Mengikuti forum, roundtable, dan program literasi UMKM.

7. Apa Artinya bagi Anggota

- Kepastian bahwa kebebasan memilih dan interoperabilitas merchant diperjuangkan bersama.
- Standar identitas/KYB merchant yang efisien dan netral vendor — onboarding lebih cepat dan aman.
- Kerangka keamanan & anti-fraud bersama yang menurunkan risiko seluruh ekosistem.
- Suara industri yang kredibel dan netral dalam dialog kebijakan nasional.
- Akses ke wawasan ekonomi ritel agregat untuk pengambilan keputusan.

8. Peta Jalan 12 Bulan (Ringkas)

Periode	Fokus
0-90 hari	Pengakuan domain strategis; pembentukan Kelompok Kerja; sesi dengar pendapat anggota; penerbitan Prinsip Interoperabilitas (Draf Diskusi).
3-6 bulan	Roundtable industri; penajaman prinsip; baseline keamanan & tata kelola data.
6-12 bulan	Penyempurnaan prinsip; studi identitas merchant; forum kebijakan publik; masukan konsultasi.

Seluruh sasaran bersifat aspiratif dan institusional (bukan target komersial). Rincian penuh tersedia dalam paket kebijakan internal ATRI.

9. Ajakan Keterlibatan & Kontak

Partisipasi Anda menentukan arah bersama. Untuk menunjuk perwakilan pada Kelompok Kerja atau memberi masukan, silakan hubungi Sekretariat ATRI.

Surel: sekretariat@atri.or.id · Situs: www.atri.or.id

Sekretariat ATRI — Rukan Cordoba #D-25, Green Lake City, Cipondoh, Tangerang, Banten 15147.

Publikasi ini bersifat informatif dan non-komersial. ATRI bersifat netral, tidak mengatur harga, tidak mengendalikan strategi bisnis anggota, dan tidak melakukan aktivitas komersial atas nama anggota. Angka bersumber dari lembaga resmi (Bank Indonesia, OJK/BPS, Kemendagri); kebijakan yang belum final ditandai secara jelas dan dapat berubah.